

Hardiknas 2026 di Bombana, Wakil Bupati Ahmad Yani Tekankan Pendidikan Berkarakter dan Berkeadilan

BOMBANA, Sultranet.com - Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Bombana. Momentum tersebut menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh elemen daerah dalam membangun pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan merata bagi seluruh masyarakat, Sabtu (2/5/2026).

Upacara Hardiknas itu diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga pendidik, hingga para pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Bombana. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan semangat bersama dalam mendukung kemajuan pendidikan di daerah.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Ahmad Yani membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dalam amanatnya, ditegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan pendidikan yang memanusiakan manusia.

“Pendidikan adalah proses membangun manusia seutuhnya. Pendidikan harus dilaksanakan dengan ketulusan, kasih sayang, dan upaya untuk menumbuhkan potensi terbaik setiap anak bangsa,” ujar Ahmad Yani saat membacakan amanat Mendikdasmen RI.

Dalam pidato tersebut, nilai-nilai pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara kembali ditekankan sebagai fondasi utama dalam dunia pendidikan nasional. Konsep asah, asih, dan asuh dinilai tetap relevan dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan akhlak mulia.

Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis yang menyentuh aspek pembelajaran, infrastruktur, hingga transformasi digital. Salah satu langkah yang terus diperkuat adalah penerapan program Pembelajaran Mendalam atau Deep Learning yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemahaman peserta didik.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi pendidikan turut menjadi perhatian serius guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih modern dan efisien.

“Transformasi pendidikan harus terus berjalan. Sekolah harus mampu menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal,” lanjut Ahmad Yani dalam amanat tersebut.

Perhatian terhadap kesejahteraan dan kualitas guru juga menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pendidikan nasional. Guru disebut sebagai aktor utama dalam keberhasilan pendidikan sehingga peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, hingga dukungan kesejahteraan menjadi prioritas pemerintah.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan karakter peserta didik melalui berbagai program pendukung, seperti gerakan literasi dan numerasi, pengembangan pembelajaran berbasis STEM, serta aktivitas ekstrakurikuler yang mendorong kreativitas dan daya saing generasi muda.

Tidak hanya itu, pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat turut menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan, termasuk melalui pendidikan jarak jauh, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

“Pendidikan bermutu harus dapat dirasakan oleh semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara,” tegasnya.

Suasana upacara berlangsung tertib dan penuh semangat nasionalisme. Para peserta tampak mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan khusyuk sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan dunia pendidikan di Indonesia.

Peringatan Hardiknas 2026 di Kabupaten Bombana kemudian ditutup dengan doa bersama. Doa tersebut dipanjatkan sebagai harapan agar pendidikan Indonesia terus berkembang, semakin maju, dan mampu melahirkan generasi unggul yang berdaya saing menuju Indonesia yang makmur dan bermartabat.

Momentum Hardiknas tahun ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial agar cita-cita menciptakan sumber daya manusia unggul dapat benar-benar terwujud.

Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh pemangku kepentingan terus menjaga sinergi dan konsistensi dalam membangun pendidikan yang inklusif, berkualitas, serta mampu menjawab tantangan masa depan.

Guru Agama, Lebih dari Sekadar Pengajar: Cermin Kehidupan dan Penjaga Nilai

Sultranet.com — Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, peran guru agama dinilai tidak lagi sebatas penyampai materi pelajaran di ruang kelas. Lebih dari itu, guru agama hadir sebagai teladan hidup, penjaga nilai moral, sekaligus pembimbing karakter generasi muda agar tetap berpegang pada ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Pandangan ini disampaikan oleh Aisyah Awaluddin dalam sebuah tulisan reflektif yang menyoroti pentingnya lima karakter utama yang harus dimiliki guru agama di era modern, yakni keteladanan (*uswatun hasanah*), moderasi, kebijaksanaan, komunikatif, dan keadilan.

Menurutnya, keteladanan menjadi fondasi utama. Guru agama tidak cukup hanya

menyampaikan ajaran, tetapi harus mampu menghadirkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. “Murid mungkin lupa apa yang diajarkan, tetapi tidak akan lupa bagaimana gurunya bersikap,” tulisnya.

Selain itu, sikap moderat atau wasathiyah disebut menjadi kunci dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan. Guru agama dituntut mampu menyampaikan ajaran secara proporsional tanpa mudah menghakimi, serta membuka ruang dialog yang sehat di lingkungan pendidikan.

Aspek kebijaksanaan juga menjadi sorotan. Guru agama diharapkan mampu bersikap adil dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama saat menghadapi persoalan siswa. Pendekatan yang mengedepankan refleksi dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sikap menghakimi.

Tak kalah penting, kemampuan komunikasi menjadi jembatan antara ilmu dan hati. Guru yang komunikatif dinilai mampu menyampaikan materi secara sederhana, relevan, dan dekat dengan kehidupan siswa, sehingga nilai-nilai agama dapat diterima dengan baik.

Sementara itu, prinsip keadilan menjadi pilar dalam menciptakan suasana belajar yang sehat. Guru agama dituntut tidak membeda-bedakan siswa, baik dari segi kemampuan akademik maupun latar belakang sosial.

Aisyah menegaskan, peran guru agama sejatinya merupakan panggilan jiwa yang memikul tanggung jawab besar dalam membentuk generasi berakhlak mulia. “Guru agama adalah warisan peradaban. Di tangan mereka, masa depan moral bangsa dipertaruhkan,” ungkapnya.

Di tengah krisis keteladanan yang kerap menjadi sorotan publik, kehadiran guru agama yang ideal dinilai menjadi harapan dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual di tengah masyarakat.

Dinkes Bombana Tingkatkan Kompetensi Tenaga Medis Lewat Pelatihan Tata Laksana Malaria

Bombana, Sultranet.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian malaria melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Pelatihan Tata Laksana Malaria bagi tenaga medis selama tujuh hari yang terbagi dalam dua angkatan, hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung pada 13-19 April 2026 untuk angkatan pertama dan 22-28 April 2026 untuk angkatan kedua.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kemampuan tenaga medis dalam mendeteksi, menangani, dan mengendalikan kasus malaria secara cepat dan tepat sesuai standar pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana itu diikuti oleh dokter umum serta programmer malaria dari seluruh puskesmas dan tingkat kabupaten. Para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif terkait tata laksana malaria melalui berbagai metode pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, diskusi kelompok, penugasan, hingga praktik lapangan secara langsung.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit menular seperti malaria yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.

Menurut Fatmiati, tenaga kesehatan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus malaria sejak dini agar tidak berkembang menjadi kasus yang lebih serius di tengah masyarakat.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tenaga medis terkait tata laksana malaria yang sesuai standar, mulai dari deteksi dini, diagnosis, pengobatan yang tepat, hingga upaya pencegahan dan pengendalian di lapangan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas tenaga medis menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung target pemerintah menuju eliminasi malaria. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus mendorong penguatan kompetensi tenaga kesehatan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Selama pelatihan berlangsung, peserta tidak hanya menerima teori di dalam kelas, tetapi juga mengikuti praktik lapangan di sejumlah puskesmas di Kota Kendari. Kegiatan praktik lapangan dilaksanakan di Puskesmas Lepo-Lepo, Puskesmas Puuwatu, Puskesmas Kemaraya, dan Puskesmas Poasia.

Melalui praktik lapangan tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk memahami secara langsung mekanisme penanganan malaria di fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari proses pemeriksaan pasien, penggunaan alat diagnosis, tata cara pengobatan, hingga sistem pelaporan kasus malaria.

Fatmiati menilai pendekatan praktik lapangan sangat penting agar peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan ketika kembali bertugas di wilayah masing-masing.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pelayanan sehari-hari sehingga kualitas penanganan malaria di Kabupaten Bombana semakin baik dan responsif,” katanya.

Selain meningkatkan kemampuan tenaga medis, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular. Dinas Kesehatan Bombana menilai pengendalian malaria membutuhkan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat agar upaya pencegahan berjalan optimal.

Malaria sendiri masih menjadi salah satu penyakit menular yang memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan

lingkungan, menghindari gigitan nyamuk, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini terus digencarkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pencegahan malaria melalui penerapan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih.

“Bebas malaria dimulai dari kita. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Karena itu, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan malaria,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui pelatihan tersebut, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, khususnya dalam penanganan malaria. Dengan tenaga medis yang lebih kompeten dan sistem pengendalian yang semakin kuat, Bombana optimistis mampu mempercepat upaya menuju wilayah bebas malaria sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Harmoni Sultra 2026 Jadi Panggung Dinas Pariwisata Bombana Promosikan UMKM dan Industri Kreatif Daerah

SULTRANET.COM, KENDARI - Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana memanfaatkan momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 sebagai panggung strategis untuk memperkenalkan potensi daerah melalui produk UMKM, industri kreatif, hingga kekayaan budaya khas Wonua Bombana. Kehadiran Bombana dalam kegiatan bertajuk Harmoni Sultra itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri di kawasan Eks MTQ Kota Kendari, Jumat, 24 April 2026.

Perayaan HUT Sultra yang berlangsung selama empat hari, mulai 24 hingga 27 April 2026, berlangsung meriah dengan menghadirkan berbagai agenda yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM, pawai budaya, perlombaan, lulo massal, konser musik rakyat, hingga atraksi dirgantara TNI Angkatan Udara yang menyedot perhatian ribuan pengunjung.

Di tengah kemeriahan itu, stan Kabupaten Bombana tampil membawa identitas daerah dengan menampilkan beragam produk unggulan hasil karya masyarakat lokal. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana menonjolkan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari strategi promosi daerah sekaligus upaya memperluas pasar produk lokal Bombana.

Berbagai produk olahan hasil pertanian, kerajinan tangan, hingga karya busana bermotif khas Bombana dipamerkan kepada masyarakat dan pengunjung dari berbagai daerah. Produk-produk tersebut tidak hanya menjadi simbol kreativitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bombana yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana, Anton Ferdinan, mengatakan partisipasi Bombana dalam Harmoni Sultra bukan sekadar memenuhi agenda pameran daerah, tetapi menjadi bagian dari langkah besar pemerintah daerah dalam memperkenalkan potensi Bombana secara lebih luas.

“Pameran Bombana dalam rangkaian acara Harmoni Sultra meliputi pameran potensi sumber daya alam Wonua Bombana, pameran produk UMKM, dan potensi industri Wonua, mulai dari industri kerajinan hingga ragam karya busana dengan berbagai motif Bombana,” kata Anton Ferdinan.

Menurut Anton, keikutsertaan Bombana dalam Harmoni Sultra menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang berkembang pesat, tidak hanya bertumpu pada sektor sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Ia menjelaskan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana terus mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Langkah

tersebut dilakukan melalui pembinaan UMKM, promosi produk lokal, hingga penguatan identitas budaya Bombana di berbagai ajang regional maupun nasional.

“Kami ingin memperlihatkan bahwa Bombana memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tidak hanya kekayaan alam, tetapi juga kreativitas masyarakatnya yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan bernilai jual,” ujarnya.

Dalam pameran tersebut, sejumlah produk lokal Bombana mendapat perhatian pengunjung karena dinilai memiliki ciri khas tersendiri. Mulai dari olahan pangan lokal, kerajinan berbahan alami, hingga busana dengan motif etnik Bombana menjadi daya tarik yang memperlihatkan kekayaan budaya daerah.

Kehadiran produk-produk lokal itu sekaligus memperlihatkan perubahan arah pembangunan ekonomi di Bombana yang kini mulai bergerak menuju penguatan sektor industri kreatif dan UMKM. Pemerintah daerah menilai sektor tersebut memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi rakyat di tengah tantangan ekonomi global.

Selain menjadi ajang promosi, Harmoni Sultra juga dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi antarwilayah untuk saling bertukar pengalaman dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana, kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperluas jaringan promosi sekaligus memperkenalkan wajah baru Bombana yang lebih kreatif dan kompetitif.

Semangat kebersamaan yang terbangun dalam perayaan HUT Sultra itu juga dinilai menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengembangan sektor UMKM dan industri kreatif berbasis lokal. Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis potensi yang dimiliki daerah dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Partisipasi Bombana dalam Harmoni Sultra 2026 akhirnya tidak hanya menjadi simbol kehadiran daerah dalam perayaan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga menjadi penegasan bahwa Bombana terus bergerak membangun ekonomi daerah melalui kreativitas masyarakat, penguatan budaya lokal, dan dukungan

penuh terhadap pelaku UMKM.

Deskripsi Meta:

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana tampil mempromosikan UMKM dan industri kreatif daerah dalam ajang Harmoni Sultra 2026 di Kendari dengan membawa identitas khas Wonua Bombana. (adv)

Gemilang! Konkep Puncaki IPKD Sultra, Bukti Tata Kelola Keuangan Makin Berkualitas

SULTRANET.COM, KONKEP - Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, yang diumumkan oleh Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri RI), Kamis (23/04/2026).

Capaian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah di Konkep berjalan di jalur yang tepat, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan.

IPKD sendiri merupakan indikator penting yang mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Posisi puncak yang diraih Konkep mencerminkan konsistensi dan disiplin dalam mengelola anggaran secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penilaian tim IPKD, lima daerah dengan capaian tertinggi di Sulawesi Tenggara yakni Konawe Kepulauan dengan skor 79,161, disusul Konawe Utara (76,647), Buton (75,208), Buton Selatan (74,981), dan Bombana (74,533).

Prestasi ini sekaligus menempatkan Konkep sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di wilayah tersebut. Keberhasilan ini tidak terlepas

dari kepemimpinan Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak bersama Wakil Bupati Muhamad Farid, yang dinilai mampu mendorong sistem pemerintahan berjalan efektif dan terarah.

Di sisi teknis, peran Kepala Badan Keuangan Daerah Konkep, Mahmud, juga dinilai signifikan dalam menghadirkan pembenahan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, efisien, dan minim risiko penyimpangan.

Mahmud menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus menjaga sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

“Capaian ini tentunya tidak lepas dari dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Konkep, serta sinergitas seluruh perangkat daerah sehingga perencanaan dan realisasi anggaran berjalan lebih selaras,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sistem dilakukan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

“Dampaknya tidak hanya terlihat pada capaian administratif, tetapi juga pada meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Keuangan daerah tidak lagi sekadar dikelola, tetapi benar-benar dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sekaligus terus berinovasi guna menjaga standar tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan: Aldi Dermawan

Pansus DPRD Muna Limpahkan

Kasus RSUD dr. LM Baharuddin ke APH

MUNA, Sultranet.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Muna resmi menyerahkan hasil penyelidikan terkait polemik manajemen dan dugaan buruknya pelayanan di RSUD dr. LM Baharuddin kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti, setelah bekerja selama lima bulan, Rabu, 22 April 2026.

Keputusan ini diambil setelah tim Pansus yang dipimpin Rasmin menuntaskan serangkaian investigasi yang berangkat dari keluhan masyarakat yang viral di media sosial hingga mendapat sorotan nasional. Pansus kemudian melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pendalaman terhadap sejumlah aspek krusial, mulai dari dugaan maladministrasi pelayanan, aliran dana operasional ke bank di luar daerah, hingga evaluasi tata kelola rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam konferensi pers di ruang Komisi I DPRD Muna, Rasmin menjelaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh melalui pengumpulan data primer dan sekunder, pemeriksaan dokumen keuangan, serta verifikasi langsung di lapangan.

“Kami telusuri berbagai dokumen resmi dan melakukan kunjungan langsung untuk memastikan keabsahan setiap data yang kami peroleh,” kata Rasmin.

Untuk memperkuat analisis, Pansus juga melakukan studi banding ke RSUD Konawe yang dinilai memiliki sistem pengelolaan BLUD yang baik di Sulawesi Tenggara. Selain itu, tim turut berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra guna menelaah hasil temuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan rumah sakit.

Rasmin menegaskan, seluruh kerja Pansus dilakukan tanpa menggunakan anggaran daerah. Menurutnya, tim bekerja secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keluhan masyarakat.

“Pansus ini tidak menggunakan anggaran APBD sepeser pun, baik di pagu 2025 maupun 2026. Kami bekerja secara ikhlas untuk menjawab harapan masyarakat,”

ujarnya.

Namun, dalam proses pendalaman, Pansus menghadapi kendala serius. Dalam rapat kerja bersama manajemen RSUD dr. LM Baharuddin, pihak rumah sakit tidak memenuhi permintaan dokumen penting, yakni Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dan operasional, meski telah diajukan secara resmi oleh pimpinan DPRD.

Akibatnya, proses pendalaman dihentikan dan dinyatakan selesai. Pansus kemudian memutuskan menyerahkan seluruh dokumen dan temuan kepada APH karena tidak memiliki kewenangan melakukan audit forensik maupun penyelidikan hukum lanjutan.

“Kami serahkan seluruh berkas dan temuan ini ke APH, mengingat Pansus tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit forensik atau penyelidikan hukum lebih lanjut,” ujar Rasmin.

Selanjutnya, hasil kerja Pansus akan direkapitulasi dan divalidasi sebelum disampaikan kepada pimpinan DPRD Muna untuk dibahas dalam rapat paripurna. Sebelum itu, akan digelar rapat teknis internal guna merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen rumah sakit agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Rasmin menambahkan, rekomendasi resmi belum dapat diterbitkan saat ini karena masih dalam tahap analisis. Penentuan lembaga APH yang akan menangani kasus tersebut, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, juga masih menunggu hasil pembahasan internal.

“Kami targetkan rekomendasi ini dapat diterbitkan paling lambat akhir April atau awal Mei mendatang,” pungkasnya.

Penulis: Borju

Dinkes dan BPJS Kesehatan Evaluasi Kinerja FKTP Bombana, Dua Puskesmas Raih Penghargaan

Bombana, Sultranet.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan pertama melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) FKTP Kabupaten Bombana Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pelayanan kesehatan dalam mendukung pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan itu diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta pejabat eselon Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bombana, kepala puskesmas se-Kabupaten Bombana, hingga sejumlah klinik mitra BPJS Kesehatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Kapitasi Berbasis Kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Bombana.

Melalui forum tersebut, seluruh peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus diterapkan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk indikator-indikator penilaian kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana.

Menurut Fatmiati, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus terus didorong melalui evaluasi berkelanjutan, peningkatan koordinasi, serta penguatan komitmen seluruh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan sesuai standar dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mendorong fasilitas kesehatan agar terus meningkatkan mutu layanan, kedisiplinan, dan capaian program kesehatan masyarakat.

Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana. Dengan adanya koordinasi yang kuat, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dapat semakin meningkat dan merata.

Dalam kegiatan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan piagam penghargaan kepada dua puskesmas yang dinilai memiliki dedikasi dan capaian baik dalam pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja, yakni Puskesmas Poleang Timur dan Puskesmas Poleang Utara.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kedua puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta JKN di wilayah masing-masing.

Fatmiati menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua puskesmas tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin, dan komitmen bersama seluruh tenaga kesehatan.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus mendukung

peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan melalui pembinaan, monitoring, dan penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sistem tersebut dinilai mampu mendorong fasilitas kesehatan lebih aktif dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama semakin optimal dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana. (adv)

PKB Bombana Gelar Muscab 2026, DPP Soroti Keberhasilan Konsolidasi Politik hingga Raih Kursi Ketua DPRD dan Bupati

Kendari, sultranet.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda konsolidasi organisasi dan penataan kepengurusan partai untuk periode 2026-2031. Kegiatan tersebut berlangsung di Phinisi Ballroom Hotel Kendari dan menjadi bagian dari Muscab serentak DPC PKB se-Sulawesi Tenggara zona daratan yang diinisiasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Tenggara, Minggu (20/4/2026).

Muscab tersebut menjadi momentum penting bagi PKB Bombana dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus menyusun strategi politik menghadapi berbagai agenda demokrasi pada periode mendatang.

Sejumlah tokoh penting hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB sekaligus anggota DPR RI, Jazilul Fawaid, Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara yang juga anggota DPR RI Komisi IV, serta unsur pimpinan daerah dan kader partai dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Jazilul Fawaid menegaskan bahwa Muscab PKB Bombana memiliki arti strategis bagi partai. Menurutnya, kehadirannya di Sulawesi Tenggara bukan sekadar menghadiri agenda organisasi rutin, melainkan menjalankan mandat langsung dari DPP PKB untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan partai di Kabupaten Bombana.

“Ini bukan agenda biasa. Saya datang ke sini karena diperintahkan langsung oleh DPP, khusus untuk Bombana,” kata Jazilul Fawaid di hadapan peserta Muscab.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian peserta karena menunjukkan besarnya apresiasi DPP terhadap capaian politik yang berhasil diraih PKB Bombana dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam perjalanan politiknya, PKB Bombana dinilai berhasil mencatat pertumbuhan signifikan. Jika pada Pemilu 2014 partai tersebut belum memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Bombana, kondisi itu berubah secara bertahap melalui proses konsolidasi internal dan penguatan basis dukungan masyarakat.

Pada Pemilu 2019, PKB Bombana berhasil meraih tiga kursi DPRD dan menempatkan salah satu kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana. Capaian tersebut menjadi tonggak awal kebangkitan partai di daerah yang dikenal memiliki dinamika politik cukup kompetitif itu.

Keberhasilan tersebut berlanjut pada Pemilu 2024. PKB Bombana meningkatkan perolehan kursinya menjadi empat kursi di DPRD dan berhasil mengantarkan kader partai menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bombana.

Tidak hanya di jalur legislatif, pengaruh politik PKB Bombana juga terlihat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada 2024, kader yang berasal dari

unsur Dewan Syura PKB berhasil memenangkan pemilihan dan kini menjabat sebagai Bupati Bombana.

Rangkaian capaian itu menjadikan Bombana sebagai salah satu daerah dengan perkembangan politik PKB yang paling menonjol di Sulawesi Tenggara. Keberhasilan mempertahankan tren elektoral serta menempatkan kader pada posisi strategis dinilai sebagai hasil dari kerja organisasi yang terbangun secara berjenjang, mulai dari tingkat cabang hingga akar rumput.

Muscab 2026 karena itu tidak hanya dipandang sebagai forum pergantian kepemimpinan semata. Agenda ini juga menjadi ruang evaluasi sekaligus penyusunan langkah-langkah strategis partai dalam memperkuat pelayanan politik kepada masyarakat.

Para peserta Muscab diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan yang solid, adaptif, dan mampu menjawab tantangan politik yang semakin dinamis. Regenerasi kepemimpinan, penguatan struktur partai, peningkatan kapasitas kader, serta perluasan basis dukungan masyarakat menjadi beberapa isu utama yang mengemuka dalam forum tersebut.

Di sisi lain, keberhasilan yang telah diraih PKB Bombana juga membawa tanggung jawab yang lebih besar. Dengan kader yang kini menduduki posisi Ketua DPRD dan Bupati, ekspektasi publik terhadap kontribusi partai dalam pembangunan daerah semakin tinggi.

Kondisi tersebut menuntut partai untuk terus menjaga soliditas internal serta memastikan seluruh kader mampu menjalankan amanah politik secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagi PKB, Bombana kini tidak lagi sekadar menjadi salah satu wilayah kepemimpinan di Sulawesi Tenggara. Daerah ini telah berkembang menjadi salah satu contoh keberhasilan konsolidasi politik yang mampu mengubah posisi partai dari tanpa kursi legislatif menjadi kekuatan politik yang memegang peran penting dalam pemerintahan daerah.

Melalui Muscab 2026, PKB Bombana berupaya memperkuat fondasi tersebut agar tetap berkelanjutan. Konsolidasi organisasi yang kuat, kaderisasi yang berkesinambungan, serta kedekatan dengan masyarakat menjadi modal utama untuk menjaga tren positif yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade

terakhir.

Sumber: Kibar News

Yudi Utama Arsyad Bersama Warga dan Aparat Gotong Royong Perbaiki Jembatan Tampabulu

Bombana, sultranet.com - Upaya perbaikan darurat jembatan penghubung di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, terus dilakukan untuk menjaga akses vital masyarakat tetap berfungsi. Anggota DPRD Bombana Yudi Utama Arsyad (YUA) turun langsung bergotong royong bersama warga lintas desa serta aparat kepolisian dan TNI dalam pengerjaan jembatan sementara yang selama ini dikeluhkan masyarakat, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan masyarakat dari Desa Tampabulu, Desa Biru, dan Desa Tanah Poleang. Personel Polres Bombana dan unsur TNI dari Kodim setempat juga ikut ambil bagian dalam memperbaiki bentangan papan jembatan yang rusak, khususnya pada bagian papan roda yang menjadi jalur utama kendaraan melintas.

Yudi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bombana tampak membaur bersama masyarakat, mengangkat material dan ikut memasang papan jembatan. Ia mengatakan, perbaikan ini merupakan langkah darurat agar aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu pembangunan jembatan permanen oleh pihak berwenang.

“Ini bentuk kepedulian bersama. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama karena akses ini sangat vital bagi masyarakat. Petani, pedagang, dan warga setiap hari bergantung pada jalur ini,” kata Yudi di sela kegiatan.

Menurutnya, kondisi jembatan yang rusak telah menghambat distribusi hasil

pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Karena itu, perbaikan sementara dilakukan untuk memastikan kendaraan roda dua maupun roda empat tetap bisa melintas dengan aman.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana turut berkontribusi dengan menyediakan material papan sebanyak sekitar 4 kubik. Sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV juga memberikan dukungan material sekitar 1 kubik untuk menunjang pengerjaan jembatan sementara.

Yudi menyampaikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dalam kegiatan gotong royong tersebut. Namun ia menegaskan bahwa perbaikan darurat ini bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

“Perbaikan ini hanya sementara. Kami berharap ke depan jembatan ini segera direalisasikan pembangunannya secara permanen. Usulan sudah kami sampaikan ke Balai Wilayah Sungai,” ujarnya.

Ia menambahkan, jembatan di Desa Tampabulu merupakan jalur strategis yang menghubungkan beberapa desa bahkan kecamatan di wilayah Poleang. Karena itu, keberadaannya sangat penting dalam mendukung mobilitas warga serta kelancaran aktivitas ekonomi lokal.

“Jembatan ini menghubungkan banyak wilayah di Poleang. Kalau akses ini terganggu, dampaknya luas, bukan hanya satu desa tapi beberapa kecamatan,” kata Yudi.

Keterlibatan langsung Yudi dalam kegiatan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat. Warga menilai kehadiran wakil rakyat di tengah kegiatan gotong royong menjadi bukti nyata kepedulian terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun. Mereka juga menginginkan adanya perhatian lebih serius terhadap infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama kehidupan warga di wilayah tersebut. (IS)

Bupati-Wakil Bupati Bombana Kirim Karangan Bunga ke DPC PBB, Ucapkan Selamat atas Kepemimpinan Yuri-Ruksamin

Bombana, sultranet.com - Bupati Bombana, Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) di bawah komando Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB, dengan mengirimkan karangan bunga ke markas DPC PBB Bombana di Jalan Lampusui, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, Senin (20/4).

Ucapan tersebut menjadi simbol hubungan politik yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan PBB sebagai partai pengusung dalam kontestasi politik sebelumnya. Bupati dan Wakil Bupati berharap, kepemimpinan baru ini mampu membawa PBB ke arah yang lebih maju, berkembang, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di DPP PBB. Semoga di bawah kepemimpinan ini, PBB semakin maju dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah,” demikian pesan yang disampaikan melalui karangan bunga tersebut.

Sikap tersebut mendapat respons positif dari Ketua DPC PBB Bombana yang juga anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA). Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Bombana.

“Atas nama keluarga besar PBB Bombana, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati atas ucapan selamat dan dukungannya. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja dan berkontribusi bagi daerah,” ujar YUA.

Lebih lanjut, YUA menegaskan komitmen PBB di DPRD Bombana untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami di DPRD dari PBB berkomitmen untuk selalu mendukung program pemerintah yang pro rakyat. Namun, kami juga akan tetap berada di garda terdepan untuk mengingatkan jika ada kekeliruan. Itu bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, PBB siap memberikan masukan konstruktif serta berperan aktif dalam menyukseskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Menurutnya, kolaborasi yang sehat dan terbuka akan memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.

“Kami siap memberikan masukan dan berkontribusi secara nyata dalam menyukseskan visi misi kepala daerah. Tujuan kita sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Bombana,” tandasnya. (IS)